



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENCEP DUDI GINANJAR
2. Jabatan : KEPALA SUBDIREKTORAT STRATEGI KOMUNIKASI, MONITORING, DAN EVALUASI
3. NHK : 123490

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.592.195.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/160 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 446.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m²/56 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 971.250.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.432 m²/500 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.231.250.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m²/54 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 157.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/76 m² di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 288.750.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 236.880.000
7. Tanah Seluas 2.005 m² di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 547.365.000
8. Tanah Seluas 1.022 m² di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 536.550.000
9. Tanah Seluas 336 m² di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 176.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 432.250.000

1. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.



4.750.000

2. MOBIL, CHEVROLET TRAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

161.500.000

3. MOBIL, TOYOTA HARRIER 2.4 AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI

Rp. 161.500.000

4. MOBIL, NISSAN XTRAIL T31 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

104.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.402.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 150.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.129.924.674

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 8.706.369.674

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.706.369.674

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.